

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG

Danny Permana^{1)*}

Universitas Jenderal Achmad Yani¹⁾

Email: danny.permana.01@lecture.unjani.ac.id^{1)*}

Abstract

This research was made because of the need to optimize the role of local government towards flood disaster risk management in Bandung Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies, the main informants are officials at BPBD Bandung Regency. Based on the results of this study, it was found that BPBD Bandung Regency carried out a form of community capacity building in the form of socialization to the community about flood management, and providing early warnings. Strategising with other agencies to assist in directly executing the programme. There is a programme as a means of communication that is being developed, namely empowering and coordinating with community groups such as scout members and disaster preparedness cadets to assist the community in disaster risk management. So to streamline performance and coordination between stakeholders, BPBD acts as a means of conflict resolution, or in this case it can be a misunderstanding or miscommunication.

Keywords: Role of Government, Risk Management, Flood Disaster.

Abstrak

Penelitian ini dibuat karena perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, informan utama adalah aparatur di BPBD Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa BPBD Kabupaten Bandung melakukan bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir, dan memberikan peringatan dini. Berstrategi dengan instansi lain untuk membantu dalam mengeksekusi program secara langsung. Adanya Program sebagai sarana komunikasi yang sedang disusun yaitu memberdayakan dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat seperti anggota pramuka dan taruna siaga bencana untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana. Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar *stakeholder* tersebut BPBD berperan sebagai sarana penyelesaian konflik, atau dalam hal ini dapat berupa kesalahpahaman atau miskomunikasi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penanggulangan Risiko, Bencana Banjir

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan wujud dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Kristian, I, et al., (2021) Haradi, et al., (2007) menyatakan bahwa bencana (*disaster*) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor *non-alam* maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Menurut Suparta (2004), “banjir adalah aliran air yang relatif tinggi, dan tiga tertampung oleh alur sungai atau saluran air”. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses alamiah atau fenomena alam, yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab, yaitu fenomena alam seperti curah hujan, iklim, geomorfologi wilayah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam juga lingkungan menjadi rusak. Kabupaten Bandung tidak terlepas dari ancaman banjir yang sewaktu waktu dapat menyerang wilayah Kabupaten Bandung, yang mengakibatkan banyak kecamatan di Kabupaten Bandung terendam air ketika musim hujan tiba. Bencana banjir di daerah Kabupaten Bandung yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Citarum, terjadi di daerah Pameungpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Majalaya, Cicalengka dan Rancaekek, banjir terjadi akibat meluapnya air di beberapa sungai yang melintasi daerah tersebut, yaitu Sungai Cibodas, Cisangkuy, Citarik, Cimande, dan Cijalupang yang terjadi berulang kali.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Peran

Nurdin dan Abrori (2006) berpendapat bahwa Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu. Kemudian Goos, Mason dan McEachern (Wirutomo, 1981) mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Ross (Phill, Astrid, & Susanto, 1979) bahwa peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif. Menurut Sarwono (2015), Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Amanat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 terkait Pembentukan pemerintahan daerah, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Suhady (Tjandra, 2009) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan

administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

3. Bencana

Secara definisi, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun faktor yang disebabkan oleh manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda, dan timbulnya dampak psikologis. Kristian, I, et al., (2021). Bencana alam juga didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi di alam yang kenyataannya dapat berdampak besar bagi populasi perkembangan makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan ataupun hewan. Menurut Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, jenis-jenis bencana yaitu:

4. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

5. Bencana Non-alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

6. Bencana Sosial

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

7. Bencana Banjir

“Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (*runoff*) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain”. (Ligal, 2008)

8. Risiko Bencana

Risiko bencana diartikan sebagai perkiraan kerugian pada satu atau lebih aset penghidupan akibat suatu kejadian ancaman/bahaya. Bentuk risiko bencana dapat berupa kematian, luka-luka, sakit, kehilangan rumah dan harta benda, serta gangguan pada kegiatan masyarakat.

Risiko bencana dapat diketahui dengan mengkaji faktor-faktor yakni:

9. Ancaman

Faktor ancaman, berupa kejadian-kejadian berpeluang menimbulkan dampak kerugian baik kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran,

kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

10. Kelemahan

Faktor kelemahan, yakni kondisi-kondisi negatif penyebab masyarakat dapat terpapar ancaman. Tinggal di kawasan rawan bencana, miskin, tidak paham tanda-tanda ancaman, masa bodoh, korupsi, kebijakan pembangunan tidak sensitif bencana adalah contoh-contoh kelemahan paling umum di Indonesia.

11. Kekuatan

Faktor kekuatan, yakni bentuk-bentuk sumberdaya pada masyarakat dan para pihak (misalnya biaya, tenaga, alat, pengetahuan, kebijakan, sikap) untuk mencegah atau mengurangi ancaman, menghindari ancaman serta mengurangi kelemahan-kelemahan.

12. Manajemen Bencana

Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan:

a) Pra bencana yang meliputi

- Pencegahaan

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya)

- Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

- Kesiapsiagaan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana untuk menghindari korban jiwa dan kerugian harta benda. Tindakan kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana pencegahan bencana, menyiapkan sarana komunikasi, menyiapkan lokasi evakuasi, pelatihan personil, penyediaan sarana dan prasarana

- Peringatan dini

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi

b) Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Sistem tanggap darurat dilaksanakan dengan cara membentuk tim khusus pengendalian dan penanganan kondisi darurat, seperti pada saat terjadi kebakaran, peledakan maupun kecelakaan kerja

c) Pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana

- Pemulihan

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

- **Rehabilitasi**

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana

- **Rekontruksi**

Membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus organisasi. Penelitian kualitatif studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2016). Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ini secara dominan meliputi (Rahardjo, 2012) Pemilihan tema; Pembacaan literatur; Perumusan fokus dan masalah penelitian; Pengumpulan data; Penyempurnaan data; Pengolahan data; Analisis data; Proses analisis data; Dialog teoretik; Triangulasi temuan (Konfirmabilitas); Simpulan hasil penelitian; Laporan penelitian. (A Subagyo & I Kristian, 2023)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor pendukung merupakan aspek-aspek yang mendukung jalannya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. Maka faktor pendukung dalam hal ini diantaranya:

1. **Sinergitas antar Instansi dalam jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung**

Dalam penanggulangan risiko bencana banjir oleh BPBD yaitu dukungan dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Bandung. Bentuk dari dukungan tersebut yaitu relawan kebencanaan yang membantu BPBD menjalankan fungsi dan tugasnya dalam penanggulangan bencana banjir. Relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir merupakan ahli yang siap terjun dalam kondisi darurat ke lokasi bencana. Dengan sinergitas antar instansi tersebut maka kebutuhan masyarakat terpenuhi dan menjamin kualitas pelayanan yang optimal.

2. **Koordinasi vertikal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dengan instansi pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi.**

Tanggung jawab penanggulangan risiko bencana banjir di kota tebing tinggi tidak hanya terletak di pemerintah kota tebing tinggi namun juga semua instansi vertikal terkait. Program-program kerja BPBD Kabupaten Bandung mendapat dukungan dari instansi vertikal berupa anggaran, sarana prasarana dan pelatihan Sumber daya manusia.

3. **Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)**

Forum PRB merupakan forum yang berisi fasilitasi, monitoring yang membantu BPBD dalam program-program penanggulangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. Salah satu kelebihan forum PRB yaitu keikutsertaan masyarakat dalam forum tersebut sehingga diharapkan memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang kebencanaan.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung diantaranya:

4. Sumber daya manusia yang belum memadai

Sumber daya manusia di BPBD belum mencapai jumlah yang memadai untuk menjamin terlaksananya penanggulangan bencana banjir dengan baik, selain itu belum semua sumber daya manusia yang ada di BPBD memiliki kualifikasi standar dalam penanggulangan bencana.

5. Sarana dan Prasarana yang menunjang keberhasilan penanggulangan risiko bencana banjir

Sarana dan prasarana adalah unsur yang penting dalam pelayanan masyarakat terutama penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Tidak terpenuhinya sarana prasarana maka akan menghambat kinerja BPBD. Dari hasil observasi peneliti sarana prasarana di tebing tinggi lengkap namun memiliki kekurangan dari segi kuantitas.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana banjir

Penanggulangan bencana banjir merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan semua pihak terkhusus masyarakat, dimana masyarakat diharapkan tidak pasif bergantung pada BPBD tetapi turut serta dalam setiap program kerja BPBD dari proses perencanaan maupun pengawasan.

Dalam penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dengan menggunakan teori menurut Horoeopetri dan Santosa (2003) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan suatu peran terhadap 5 (lima) dimensi yakni peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Adapun pembahasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

7. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol setiap bencana yang terjadi. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam. Mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada asas atau prinsip-prinsip utama antara lain: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non-proselitasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung sebagai instansi pemerintah memiliki tugas memberikan rasa aman terhadap mitigasi bencana, khususnya banjir yang seperti sudah menjadi perhatian khusus apabila sedang musim penghujan, atau hujan lebat di daerah Kabupaten Bandung. Bencana dapat datang tiba-tiba bahkan tanpa bisa terprediksi, maka dari itu untuk memberikan rasa aman tersebut, kebijakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung ialah peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri. Peningkatan kapasitas berbasis masyarakat yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bencana banjir. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung sendiri berdasarkan hasil observasi lapangan, masih belum maksimal karena fokus anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Bandung menitikberatkan pada instansi lain pada jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Bandung.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengantisipasi terjadinya bencana banjir dengan membentuk bidang-bidang yang berfungsi sesuai dengan kegunaannya yang dimulai dari sebelum terjadi bencana sampai setelah terjadi bencana. Dengan melihat lokasi yang dianggap sebagai rawan bencana dengan membentuk tempat-tempat tanggap darurat ketika suatu hari terjadi bencana. Manajemen Resiko Bencana dengan membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Manangement Plan*), yaitu:

- 1) Legitimasi dengan menyusun rencana, tindakan, tanggap darurat dan lain-lain.;
- 2) Kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal dan vertikal;
- 3) Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengurangan resiko bencana;
- 4) Pendanaan berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana;
- 5) Peningkatan kapasitas berkaitan dengan masyarakat harus mampu mengantisipasi, kesiapsiagaan menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana.

Untuk mengantisipasi bencana tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah turun ke lokasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat setiap awal tahun dengan istilah memonitoring dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika banjir turun. Jadi, tim dari kesiapsiagaan telah mengetahui tempat yang perlu ditangani sementara, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah berupaya semaksimal mungkin akan tetapi, sebagai manusia biasa tentu tidak bisa melawan alam sehingga antisipasi secara dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi karena segala kemungkinan bisa terjadi. Diatas merupakan prinsip yang dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah jenis rencana penanggulangan bencana dengan tahap dan prinsipnya sebagai berikut: penyusunan pada kondisi normal, bersifat prakiraan umum, pelaku yang terlibat adalah semua pihak yang terkait. Maka dapat disimpulkan meskipun dinamika kebencanaan telah berubah ke arah tindakan preventif, namun pada kenyataannya praktek di lapangan masih berfokus pada kegiatan represif. Pengamatan mengenai kebencanaan juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memberi gambaran kurang yang masih ada di lapangan untuk menjadi referensi dalam mengambil peran sebagai suatu kebijakan.

8. Peran Sebagai Strategi

Kegiatan penanggulangan banjir di pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kegiatan pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bukan semata-mata menjadi beban pemerintah. Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana.

Dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan kemanusiaan dibutuhkan strategi yang bersinergi antara instansi pemerintahan agar masalah mengenai penanggulangan risiko bencana banjir dapat tertangani sesuai harapan. BPBD Kabupaten Bandung masih kekurangan

sumber daya manusia terutama pada saat tanggap darurat, BPBD harus menetapkan prioritas wilayah terparah untuk melakukan proses evakuasi sementara pada saat tanggap darurat tersebut merupakan fase yang paling membutuhkan tindakan cepat BPBD untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia BPBD melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya, tentunya sumber daya manusia perbatuan dari lembaga lain tidak dapat selalu siap membantu saat bencana. Kebutuhan akan sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang harus ditemukan solusinya karena bencana banjir merupakan bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba untuk itu dengan rekrutmen sumber daya manusia maka sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan BPBD dalam penanggulangan risiko bencana banjir. Hal tersebut juga mendukung dalam mewujudkan fokus capaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 Periode II, dimana pada poin (11) Terwujudnya strategi pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.

Strategi lain yang perlu diperhatikan mengenai faktor pengadaan sarana dan prasarana adalah anggaran. Anggaran bagi organisasi pemerintah seperti BPBD merupakan unsur yang sangat penting. Pentingnya anggaran bagi penanggulangan banjir karena beberapa alasan yaitu anggaran menjadi alat BPBD untuk melakukan pembangunan fasilitas penanggulangan banjir dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu anggaran juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam perannya sebagai inovator dan penyusun strategi.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan risiko bencana, pemerintah berusaha agar tersedia dana untuk keperluan darurat. Selanjutnya jika ada dana langsung dilakukan perbaikan kembali fasilitas yang rusak dengan dana yang bersumber dari beberapa bantuan yang berupa Dana Siap Pakai (DSP). Ini tentunya sangat sesuai dengan prinsip kerja Manajemen Bencana sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu prinsip praktis seperti: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas kemitraan dan pemberdayaan.

9. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi disini meliputi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menciptakan ide berupa sarana komunikasi untuk membuat kegiatan komunikasi baik antara lembaga maupun *stakeholder* dalam efektif dan efisien. Selain itu, menjadi sarana komunikasi juga berarti menjadi pihak yang memperbaiki dan membangun solusi terhadap suatu masalah berkaitan dengan peran pemerintah dalam menanggulangi risiko banjir di Kabupaten Bandung. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam mewujudkan peran sebagai alat komunikasi yakni dengan tetap memperhatikan peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, peran sebagai alat komunikasi selalu membutuhkan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan suatu mekanisme Kerjasama terstruktur yang memuat langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggulangi risiko bencana banjir, ketika terjadi bencana banjir, serta mekanisme tersebut disusun dan disepakati bersama oleh semua insitusi pelaksana dan mengatur tugas, kewenangan, koordinasi antar lembaga tersebut. Dalam penanggulangan risiko bencana yang membutuhkan waktu seperti bencana banjir di Kabupaten Bandung, wadah sebagai sarana komunikasi sangat diperlukan terutama sistem operasional untuk mempersingkat jalur koordinasi dan mempercepat penanganan agar dampak bencana yang ditimbulkan ke masyarakat dapat diminimalisir.

10. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Sebagai organisasi pemerintah yang dibentuk untuk menanggulangi bencana baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana menjadikan BPBD Kabupaten Bandung harus dapat mengambil tindakan dan upaya yang maksimal tidak hanya ketika banjir tetapi juga meminimalisir terjadinya bencana banjir tersebut. Penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang, Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar *stakeholder* tersebut BPBD berperan sebagai sarana penyelesaian konflik, atau dalam hal ini dapat berupa kesalahpahaman atau miskomunikasi. Dari hal yang telah dipaparkan diatas, bahwa untuk memperbaiki daerah yang terkena banjir, yaitu khusus di daerah sungai. Langkah yang diambil adalah penguatan tebing dan memasang beronjong berupa beton, beronjong merupakan bangunan panjang yang menyerupai pondasi bangunan rumah, akan tetapi beronjong berfungsi sebagai penahan erosi tanah sepanjang tepi sungai. Bahan dari beronjong sendiri adalah pasir, semen, batu sungai, dan kawat sebagai lapisan luar agar pondasi-pondasi ini tidak cepat rusak dan jatuh ke sungai sehingga tidak menimbun sungai. Tahap-tahap dalam perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, yakni terlebih dahulu meninjau lokasi yang akan dialokasikan kisaran dana yang akan digunakan dalam pembuatan beronjong, setelah itu para pemerintah daerah membicarakannya bersama untuk membahas anggaran sesuai kebutuhan dan selanjutnya dilakukan penanganan secara intensif untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

Dalam upaya mewujudkan peran BPBD dalam menanggulangi risiko banjir di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bandung telah berupa melaksanakan perannya sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana banjir, dimana manfaat pembangunan dan upaya yang dilakukan dirasakan oleh masyarakat, dan tinggi genangan banjir dan durasi genangan telah dapat berkurang dengan singkat.

E. SIMPULAN

Kabupaten Bandung melakukan bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir terutama pada musim penghujan tiba dan memberikan peringatan dini. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan rutin mengadakan gladi posko dan gladi lapangan dengan hasil baik BPBD maupun masyarakat mendapat gambaran langsung ketika bencana terjadi sehingga saat terjadi bencana dapat tercipta koordinasi dan tindakan yang terukur. Dalam peran sebagai strategi, instansi yang paling sering kita andalkan untuk menjadi mitra koordinasi ialah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk bantu dalam mengeksekusi langsung karena personil BPBD sendiri yang terbatas serta sarana dan prasarana yang masih kurang secara kuantitas. Dalam peran sebagai alat komunikasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menyadari peningkatan kapasitas aparatur sangat diperlukan terutama saat tanggap darurat dan tahap penanggulangan risiko bencana. Serta adanya Program sebagai sarana komunikasi yang sedang disusun yaitu memberdayakan dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat seperti anggota pramuka dan taruna siaga bencana untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana. Dalam peran sebagai alat penyelesaian sengketa, penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang.

REFERENSI

- Asian Disaster Reduction Center. (2003). *Glossary on Natural Disaster*. Bangkok: Asian Disaster Reduction Center
- Awalia, Vidia Reski., dkk. (2015). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Otoritas*, Vol 5, No (2)
- Dibyosaputro, P. (1984). *Flood Susceptibility and Hazard Survey of The Kudus Prawata-Welahan Area, Central Jawa, Indonesia*. Thesis ITS Enschede
- Harjadi, Prih., dkk. (2007). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Mitigasi
- Heryati, Sri. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol 2, No (2), hlm 139-146
- Horoepoetri, Arimbi., Achmad Santosa. (2003). *Peran Serta Masyarakat dan Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi
- H.S, Y. T., & Kristian, I. (2021). Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69–81. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18>
- International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). (2004). *Living with Risk - A Global Review of Disaster Reduction Initiatives*. New York and Geneva: United Nations Publication.
- Kodoatie, R.J. Sugiyanto. (2002). *Banjir, Bebarapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kristian, I. (2019). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Kristian, I. (2021). Perlukah Konservasi Moral?. *Jurnal RASI*, 2(1), 40–53. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.54>
- Kristian, I., & Setyasih, E. T. . (2023). Urgensi Memasukan Kurikulum Bencana Di Semua Level Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 1–6. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i1.98>
- Ligal, Sebastian. (2008). Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*, Vol 8, No (2)
- Maarif, Syamsul. (2012). *Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Subagyo, A., IP, S., Kristian, I., IP, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.